

IMPLEMENTASI PROGRAM PERBAIKAN GIZI BALITA DI POSYANDU PADA DESA BANUA RANTAU KECAMATAN BANUA LAWAS KABUPATEN TABALONG

Imelda Putri¹, Munawarah², Ratna Sari³

Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
E-mail: imeldaputri4579@gmail.com

ABSTRAK

“Perbaikan gizi menjadi salah satu program utama di Posyandu, yang bertujuan untuk menanggulangi permasalahan gizi pada kelompok balita. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan tipe deskriptif-kualitatif, dengan data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data diperoleh menggunakan teknik *purposive sampling* dengan jumlah informan sebanyak 12 orang. Berdasarkan hasil penelitian, Implementasi Program Perbaikan Gizi Balita di Posyandu pada Desa Banua Rantau Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong, telah berjalan cukup baik, sebagaimana terlihat dari : segi komunikasi, indikator penyaluran komunikasi kepada ibu balita kurang baik, sedangkan kejelasan informasi yang disampaikan sudah baik. Aspek sumberdaya, seperti ketersediaan fasilitas, tenaga yang terlatih dan pendidikan petugas belum memadai, meskipun dukungan dana telah mencukupi. Aspek disposisi dan struktur birokrasi dinilai sudah cukup baik dengan adanya SOP yang jelas dalam kegiatan Program Perbaikan Gizi Balita di posyandu. Faktor penghambat meliputi kurangnya pelatihan bagi kader posyandu, rendahnya Tingkat Pendidikan petugas, serta terbatasnya sarana dan prasarana yang memadai. Di sisi lain, faktor pendorong keberhasilan meliputi adanya kejelasan informasi kegiatan posyandu, ketersediaan dana yang memadai, serta penerapan SOP yang jelas dalam menjalankan kegiatan program Perbaikan Gizi Balita di Posyandu”.

Kata Kunci : Perbaikan Gizi, Posyandu

ABSTRACT

“Nutrition improvement is one of the primary programs at Posyandu, aimed at addressing nutritional issues in toddlers. This study uses a qualitative and descriptive-qualitative method, with data collected through interviews, observations, and documentation. The data was obtained using purposive sampling with 12 informants. The results show that the Toddler Nutrition Improvement Program at Posyandu in Banua Rantau Village, Banua Lawas Sub-district, Tabalong District, has been fairly effective. Communication to mothers of toddlers is not fully optimal, but the clarity of information provided is good. Resources such as facilities, trained personnel, and staff education remain inadequate, although funding is sufficient. Disposition and bureaucratic structures are relatively good, supported by clear Standard Operating Procedures (SOPs) for the program's activities. Challenges include insufficient training for cadres, low education levels among staff, and a lack of proper facilities and infrastructure. However, the program benefits from clear information about activities, adequate funding, and the implementation of well-defined SOPs, which support the effectiveness of the Toddler Nutrition Improvement Program at Posyandu”.

Keywords : Nutrition Improvement, Posyandu

PENDAHULUAN

Kesehatan adalah suatu kondisi keseimbangan dan kesejahteraan yang mencakup dimensi fisik, mental, dan sosial yang memungkinkan seseorang untuk melakukan tugas-tugas tanpa gangguan yang berarti. Kesehatan mencakup kesinambungan antara dimensi fisik, mental, dan sosial, serta interaksi dengan lingkungan sekitar. Selain itu, kesehatan merupakan hak asasi manusia yang mendasar dan investasi yang penting, yang memerlukan advokasi, peningkatan, dan

pengupayaan oleh setiap individu dan masyarakat secara kolektif untuk mencapai kehidupan yang sehat dan status kesehatan yang ideal. (Sinaga Marthin, 2023)

Untuk meningkatkan kemampuan masyarakat di bidang kesehatan, pemerintah memprakarsai inisiatif Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa (PKMD) pada tahun 1975. Satu tahun kemudian, PKMD didirikan sebagai inisiatif strategis untuk memperluas jangkauan pelayanan kesehatan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Bersama dengan berdirinya PKMD, berkembanglah Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) lainnya, termasuk Pos Penimbangan Balita, Pos Imunisasi, Pos KB Desa, dan Pos Kesehatan. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) didirikan untuk memfasilitasi pelayanan kesehatan yang komprehensif di satu lokasi melalui integrasi inisiatif swadaya masyarakat.

Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dikelola, diselenggarakan, dan diberdayakan oleh masyarakat bekerja sama dengan pemerintah. Tujuan utama dari Posyandu adalah untuk membantu masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan dasar dan untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi baru lahir. Selain itu, Posyandu mencakup lima program utama: Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Keluarga Berencana (KB), Imunisasi, Peningkatan Gizi, dan Pencegahan dan Penanggulangan Diare. (Sinaga Marthin, 2023)

Peningkatan gizi merupakan inisiatif utama dalam Posyandu, yang dirancang untuk mengatasi masalah gizi di antara anak-anak di bawah usia lima tahun. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 23/2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi menetapkan bahwa program ini bertujuan untuk menjamin akses terhadap pengetahuan gizi, makanan bergizi, serta pelayanan gizi dan kesehatan bagi setiap individu. Status gizi yang optimal sangat penting, terutama pada masa awal kehidupan, karena secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan fisik, perkembangan kognitif, dan fungsi kekebalan tubuh. (Diana, 2020)

Inisiatif peningkatan gizi yang dilakukan di Posyandu meliputi penimbangan berat badan, identifikasi dini kelainan pertumbuhan, konseling gizi, suplemen makanan lokal, suplementasi vitamin A, dan tablet zat besi untuk ibu hamil. Penimbangan berat badan balita merupakan komponen penting dari program peningkatan gizi di Posyandu. Penimbangan berat badan setiap bulan dilakukan untuk anak-anak di bawah usia lima tahun untuk mengevaluasi perkembangan mereka secara konsisten. Pemantauan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelainan perkembangan dini, termasuk gizi kurang atau gizi buruk, untuk memfasilitasi intervensi yang cepat dan efektif. Penanganan yang tepat untuk anak-anak yang mengalami malnutrisi dapat mengurangi risiko kematian dan menurunkan angka kematian akibat malnutrisi. (Ahmad Syahidin, 2023)

Di Desa Banua Rantau, program yang ditujukan untuk meningkatkan gizi balita mencakup berbagai inisiatif, termasuk layanan gizi, pencegahan malnutrisi, edukasi mengenai pentingnya gizi, penyuluhan mengenai perlunya pemberian ASI eksklusif bagi ibu menyusui, pemberian makanan pendamping ASI bagi anak usia 6-24 bulan, pemberian kapsul vitamin A dua kali setahun, dan pemantauan berat badan balita secara sistematis. Manfaat dari pelaksanaan program ini mencakup peningkatan pemahaman masyarakat mengenai masalah gizi pada balita, di samping memberikan pengetahuan mengenai perlunya asupan gizi yang cukup untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan yang optimal pada kelompok usia ini.

Di dua Posyandu Desa Banua Rantau yang disebutkan di atas, banyak fenomena yang muncul terkait pelaksanaan Program Perbaikan Gizi di Posyandu, yaitu sebagai berikut:

1. Kurangnya komunikasi atau interaksi sosial antara kader Posyandu dengan masyarakat, khususnya orang tua balita, mengenai pentingnya gizi seimbang bagi balita.

2. Adanya kendala atau kurangnya sarana dan prasarana di posyandu, termasuk tidak adanya tempat khusus untuk kegiatan posyandu, sehingga harus meminjam tempat dari luar, seperti Taman Kanak-Kanak Alquran.
3. Adanya beberapa petugas posyandu yang kurang proaktif dalam melaksanakan kegiatan program peningkatan gizi, yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman mereka mengenai pentingnya asupan gizi yang cukup dan tidak adanya pelatihan mengenai strategi komunikasi yang efektif dengan masyarakat (ibu balita).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif-kualitatif untuk menggambarkan serta menjelaskan pelaksanaan Program Perbaikan Gizi Balita Di Posyandu Pada Desa Banua Rantau Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan informan yang dipilih menggunakan Teknik *purposive sampling* dengan jumlah 12 informan. Data yang terkumpul dianalisis melalui Langkah-langkah seperti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kredibilitas data diuji dengan cara perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, dan *member check*. (Sugiyono, 2014, 2017)

PEMBAHASAN

A. Implementasi Program Perbaikan Gizi Balita Di Posyandu Pada Desa Banua Rantau Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong

Dalam penelitian ini, menggunakan teori Implementasi Kebijakan menurut pandangan George C. Edward III sebagai berikut :

1. Komunikasi

a. Transmisi

Istilah “transmisi” mengacu pada proses penyebaran informasi mengenai hubungan antara keputusan dan prosedur untuk melaksanakannya di antara sesama pelaksana agar tidak terjadi kesimpangsiuran.

Hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi menunjukkan bahwa program perbaikan gizi balita di Posyandu Desa Banua Rantau, Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabalong kurang berjalan dengan baik dalam hal transmisi atau penyebaran informasi. Hal ini dikarenakan, menurut para ibu balita yang disurvei, masih kurangnya penyaluran komunikasi mengenai gizi balita, dan sedikit sekali sosialisasi yang dilakukan di luar kelas balita.

Hal ini bertentangan dengan teori George C. Edward III dalam (Subarsono, 2015), yang menyatakan bahwa distribusi dan transmisi informasi yang efektif akan menghasilkan implementasi yang efektif pula.

b. kejelasan

Baik arahan implementasi maupun pesan itu sendiri harus jelas agar dapat dianggap jelas. Orang cenderung salah paham atau bahkan menolak makna yang dimaksudkan dari pesan dan instruksi komunikasi jika pesan dan instruksi tersebut tidak dibuat dengan cukup jelas.

Dalam Implementasi Program Perbaikan Gizi Balita di Posyandu di Desa Banua

Rantau, Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabalong, ditemukan bahwa informasi dikomunikasikan dengan jelas, ibu balita sudah paham dengan penyampaian Informasi terkait jadwal melalui grup WhatsApp dan dilengkapi dengan pengumuman di masjid. Hal ini terutama terjadi di kalangan ibu-ibu yang memiliki balita, yang merasa bahwa informasi yang mereka terima sudah cukup.

Menurut pandangan George C. Edward III yang disampaikan dalam (Subarsono, 2015), para pelaksana kebijakan membutuhkan informasi yang tidak ambigu dan tidak menyesatkan.

2. Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia

Dalam hal penerapan kebijakan, sumber daya manusia adalah yang terpenting. Implementasi kebijakan yang baik membutuhkan sejumlah staf yang memiliki pengetahuan, keahlian, dan kemampuan yang diperlukan.

Dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi terlihat jelas bahwa sumber daya manusia yang terlibat dalam Implementasi Program Perbaikan Gizi Balita di Posyandu Desa Banua Rantau masih kurang memiliki pendidikan, pelatihan, dan pemahaman yang memadai. Pelatihan yang diberikan sangat minim, dengan beberapa kader hanya tamat SD atau SMP, dan pelatihan hanya diadakan setahun sekali, itupun hanya sekali. Beberapa ibu berpikir bahwa para kader sudah mengetahui apa yang mereka lakukan, tetapi sebagian besar berpikir bahwa para kader tidak memiliki pengetahuan tentang gizi balita.

Hal ini bertentangan dengan apa yang diteorikan oleh George C. Edward III dalam (Subarsono, 2015), yang menyatakan bahwa sumber daya manusia, baik dalam bentuk jumlah maupun keterampilan, merupakan aset terpenting untuk menjalankan kebijakan.

b. Fasilitas

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan, fasilitas sangatlah penting. Tidak ada bedanya berapa banyak staf pelaksana yang dimiliki, keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan bergantung pada infrastruktur dan fasilitas yang mendukungnya.

Dari dokumen, wawancara, dan observasi, jelas terlihat bahwa kedua fasilitas posyandu tersebut tidak memadai dan mungkin perlu ditingkatkan. Timbangan bayi dan sebagian besar fasilitas lainnya di Posyandu Sei Irama 1 baik-baik saja, tetapi rusak atau tidak berfungsi dengan baik. Meskipun memiliki peralatan penimbangan, posyandu di Posyandu Sei Irama 2 saat ini masih menyewa tempat di TK Al-Quran karena belum memiliki lokasi permanen.

Sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh George C. Edward III dalam (Subarsono, 2015), fasilitas fisik memegang peranan penting dalam eksekusi kebijakan. Pelaksanaan kebijakan tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya sarana dan prasarana yang mendukung.

c. Dana

Dana yang dihasilkan dari kegiatan perencanaan yang disusun secara sistematis dan dijelaskan dalam unit uang selama periode atau jangka waktu yang telah ditentukan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa anggaran untuk Implementasi Program Perbaikan Gizi Balita Di Posyandu Pada Desa Banua Rantau telah disalurkan oleh pemerintah desa kepada petugas program dan kader sudah sesuai dengan kebutuhan kegiatan posyandu. Anggaran tersebut juga telah dijalankan dengan baik hingga saat ini, mendukung pelaksanaan kegiatan posyandu di kedua posyandu tersebut.

Hal ini sesuai dengan teori George Edward III dalam (Subarsono, 2015) menyatakan bahwa dana suatu perencanaan dalam suatu kegiatan disusun secara terpadu dan dijelaskan dalam satuan uang selama periode atau jangka waktu tertentu.

3. Disposisi

a. Komitmen

Kerinduan yang mendalam untuk berkontribusi dalam upaya tim. Tingkat kemauan kerja yang tinggi menunjukkan bahwa seseorang berkomitmen terhadap pekerjaan mereka, memahami pentingnya peran mereka, dan berencana untuk tetap berada di posisi mereka saat ini.

Temuan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi menunjukkan bahwa petugas dan kader di Posyandu Sei Irama 1 dan Sei Irama 2 telah bekerja sangat keras untuk mengimplementasikan Program Perbaikan Gizi Balita di Desa Banua Rantau. Kehadiran dan pendampingan dalam kegiatan posyandu merupakan bukti keseriusan dan tanggung jawab mereka dalam menjalankan kewajibannya. Di sisi lain, ada beberapa hal yang masih perlu diperbaiki, terutama terkait proses pencatatan dan pelaporan yang tidak selalu dilakukan dengan benar.

Hal ini sejalan dengan pengertian yang dikemukakan oleh George Edward III dalam (Subarsono, 2015) yang menyatakan bahwa adanya kesiapan yang tinggi untuk bekerja dan keinginan yang kuat untuk menjadi bagian dari kelompok kerja.

b. Sikap pelaksana

Keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh pola pikir para pelaksana. Hal ini sangat mungkin terjadi karena peraturan yang dibuat tidak berasal dari warga setempat yang paham betul tentang isu dan permasalahan yang mereka hadapi.

Dari wawancara dan observasi tersebut, terlihat jelas bahwa para petugas dan kader di Posyandu Sei Irama 1 dan Sei Irama 2 memiliki pola pikir tertentu. Para ibu yang membawa balita mereka ke posyandu secara konsisten disambut dengan sikap positif dan interaksi yang menyenangkan di antara mereka.

(Subarsono, 2015) mengutip teori George Edward III yang menyatakan bahwa karakter dan sifat implementor, termasuk komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis, sangatlah penting. Kemampuan implementor untuk melaksanakan suatu kebijakan demi kepuasan para pembuat kebijakan tergantung pada karakternya.

4. Struktur Birokrasi

a. SOP (Prosedur Operasi Standar)

Prosedur Operasi Standar (SOP) menguraikan langkah-langkah yang diharapkan untuk menyelesaikan suatu tugas; hal ini bagus untuk perusahaan yang tidak mengalami banyak perubahan besar, namun akan sulit bagi perusahaan yang perlu mengguncang rutinitas mereka. Dengan kata lain, SOP akan lebih mungkin menghambat pelaksanaan kebijakan jika kebijakan tersebut menuntut perubahan substansial terhadap praktik-praktik rutin organisasi.

Temuan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi menunjukkan bahwa SOP di setiap posyandu telah dibuat dengan baik dan sesuai dengan peraturan. Kegiatan posyandu yang mendukung program peningkatan gizi balita telah dipermudah dengan adanya prosedur yang telah ditetapkan.

Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh George Edward III dalam (Subarsono, 2015) yang menyatakan bahwa SOP (Standard Operating Procedures) memainkan peran penting dalam setiap organisasi, kelompok, atau sektor swasta, yang berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan bagi setiap orang.

b. Kerja Kolaboratif

Kegiatan kerja dapat dikelompokkan ke dalam komponen-komponen tertentu berdasarkan kategori yang ditentukan, sebuah praktik yang dikenal sebagai pengelompokan tugas. Banyak kelompok yang berbeda bertanggung jawab atas aspek-aspek yang berbeda dari suatu isu kebijakan, bukan hanya satu lembaga.

Temuan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi menunjukkan bahwa sistem rotasi tugas telah berjalan dengan baik di dua posyandu di Desa Banua Rantau, Sei Irama 1 dan Sei Irama 2, dalam hal pembagian tugas.

Hal ini sejalan dengan apa yang diteorikan oleh George Edward III dalam (Subarsono, 2015), yang mendefinisikan pengelompokan tugas sebagai pembagian kerja ke dalam tahapan-tahapan yang berbeda berdasarkan kategori-kategori yang telah ditetapkan.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Program Perbaikan Gizi Balita Di Posyandu Pada Desa Banua Rantau Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong.

1. Faktor Penghambat

a. Kurangnya penyaluran komunikasi yang baik terkait sosialisasi kepada ibu balita

Metode yang digunakan kader di Desa Banua Rantau untuk menyebarkan informasi tentang makanan sehat kepada ibu balita di Posyandu relevan dengan penyebaran pengetahuan secara umum. Ketika kejelasan dan ketepatan adalah hal yang paling penting dalam komunikasi.

Di Desa Banua Rantau, Program Perbaikan Gizi Balita sedang dilaksanakan, namun beberapa ibu balita merasa masih kurang dalam penyampaian petugas terutama dalam hal minimnya diadakan sosialisasi, sehingga dari hasil wawancara dan observasi tersebut menunjukkan bahwa distribusi komunikasi yang kurang baik di kedua Posyandu tersebut.

(Subarsono, 2015) mengutip tesis George Edward III, yang menyatakan bahwa transmisi informasi kepada komunikan merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Pandangan ini bertolak belakang dengan praktiknya. Informasi masih belum sampai ke masyarakat dengan baik karena tidak adanya sosialisasi dan penyuluhan.

b. Kurangnya Pelatihan dan Rendahnya Tingkat Pendidikan Petugas Posyandu

Kesesuaian pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada anggota pelaksana program perbaikan gizi Posyandu berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia.

Dari hasil wawancara dan observasi tersebut terlihat jelas bahwa tingkat pendidikan para kader yang terlibat dalam pelaksanaan program perbaikan gizi balita di Posyandu Desa Banua Rantau, Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabalong, masih rendah atau kurang sesuai jika dikaitkan dengan sumber daya manusia yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan. Di Posyandu Desa Banua Rantau, hal ini menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan Program Perbaikan Gizi Balita.

Bertolak belakang dengan tesis George Edward III yang dipaparkan dalam (Subarsono, 2015), salah satu elemen yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan adalah komponen sumber daya, khususnya manusia. Implementasi kebijakan akan menjadi tidak efisien dan lamban meskipun aturan-aturan penerapannya telah diinformasikan secara memadai, hal ini dikarenakan sumber daya manusia yang masih belum memadai baik secara kuantitas maupun kualitas (keahlian).

c. Kurangnya Sarana dan Prasarana yang Memadai dalam Program Perbaikan Gizi Balita

Implementasi kebijakan juga sangat bergantung pada fasilitas fisik. Implementasi kebijakan tidak dapat terlaksana tanpa adanya aparat yang cukup dan mau menerima serta fasilitas yang menyertainya, termasuk sarana dan prasarana.

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa posyandu di Desa Banua Rantau, Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabalong, belum memiliki sumber daya yang memadai, khususnya sarana dan prasarana, untuk mendukung program perbaikan gizi balita. Hal ini disebabkan oleh beberapa alat yang digunakan oleh program tidak sesuai standar, dan posyandu menggunakan gedung sekolah lain untuk kegiatannya.

Hal ini bertentangan dengan gagasan George Edward III yang dinyatakan dalam (Subarsono, 2015), di mana faktor sumber daya-khususnya fasilitas-merupakan salah satu elemen yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan. Implementasi kebijakan dapat terhambat oleh kurangnya fasilitas atau peralatan yang diperlukan. Sulit untuk melaksanakan kebijakan secara cepat dan tepat dengan fasilitas dan peralatan yang tersedia.

2. Faktor Pendorong

a. Kejelasan dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Posyandu

Dalam hal mengkomunikasikan penerapan kebijakan yang dimaksudkan, sangat penting bahwa instruksi harus dipahami dan dikomunikasikan dengan jelas. Akan ada lebih banyak ruang untuk kesalahpahaman karena ketidakjelasan sinyal yang diberikan terkait pelaksanaan kebijakan.

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan selama pelaksanaan program perbaikan gizi balita di posyandu di Desa Banua Rantau,

Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabalong menunjukkan bahwa indikator kejelasan sudah efektif. Hal ini ditunjukkan oleh kedua posyandu yang mengumumkan jadwal dan kegiatan posyandu kepada para ibu balita melalui aplikasi perpesanan seperti WhatsApp.

Hal ini sejalan dengan teori George Edward III yang diuraikan dalam (Subarsono, 2015), yang menyatakan bahwa komponen kunci dari implementasi kebijakan yang efektif adalah khalayak yang dituju memahami pesan dengan jelas; sebaliknya, jika kebijakan tersebut tidak jelas atau tidak diketahui, khalayak yang dituju cenderung menolak.

b. Ketersediaan Dana yang Memadai dalam Pelaksanaan Program Perbaikan Gizi Balita

Salah satu aspek penting dalam menjalankan kebijakan adalah ketersediaan sumber daya keuangan. Kebijakan yang dikomunikasikan dengan baik tidak akan berarti banyak jika orang yang ditugaskan untuk melaksanakannya tidak memiliki sarana untuk melakukannya.

Dari hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa dana yang dialokasikan untuk program perbaikan gizi balita di posyandu di Desa Banua Rantau, Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabalong, telah dikelola dengan baik oleh ketua kader posyandu sehingga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan makanan balita dan gaji kader.

Hal ini sejalan dengan tesis yang dikemukakan oleh George Edward III dalam (Subarsono, 2015) yang menyatakan bahwa sumber daya memegang peranan penting dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Sumber daya yang dimaksud adalah kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Tanpa adanya dana, kebijakan hanya akan menjadi kata-kata di atas kertas.

c. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang Jelas dalam Kegiatan Posyandu

Salah satu aspek yang paling penting dari setiap kelompok atau organisasi adalah SOP (Standard Operating Procedure). Masalah umum dalam organisasi publik dan komersial biasanya ditangani dengan metode ini.

Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan terhadap petugas posyandu di Desa Banua Rantau, Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabalong, diperoleh kesimpulan bahwa SOP program peningkatan gizi balita sudah baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Standar operasional prosedur (SOP) adalah bagian penting dari struktur organisasi, menurut teori George Edward III yang diuraikan dalam (Subarsono, 2015), SOP berfungsi sebagai peta jalan bagaimana setiap pelaksana harus bertindak.

SIMPULAN

Posyandu di Desa Banua Rantau, Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabalong, telah melaksanakan Program Perbaikan Gizi Balita dengan sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa pesan pelaksanaan Program Perbaikan Gizi Balita di Posyandu Desa Banua Rantau telah tersampaikan kepada para ibu balita secara sederhana dan efektif. Program Perbaikan Gizi Balita di Posyandu Desa Banua Rantau dilaksanakan dengan dana yang sesuai dengan jumlah yang dialokasikan oleh pemerintah desa untuk kegiatan posyandu. Tanggung jawab dan dedikasi dalam menjalankan tugas posyandu menjadi indikator komitmen yang baik dalam pelaksanaan program

perbaikan gizi balita di Desa Banua Rantau. Ibu-ibu yang memiliki balita disambut dengan hangat oleh pelaksana dalam melaksanakan Program Perbaikan Gizi Balita di Posyandu di Desa Banua Rantau Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong. Berdasarkan pedoman yang telah dikeluarkan dan dilaksanakan secara efektif, Program Perbaikan Gizi Balita di Posyandu Desa Banua Rantau Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong memiliki indikator SOP (Standar Operasional Prosedur). Indikator Pengelompokan Tugas pada Program Perbaikan Gizi Balita di Posyandu Desa Banua Rantau Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong sudah baik dan sesuai dengan perannya masing-masing dengan menggunakan sistem rotasi setiap bulannya. Mengenai aspek yang kurang diminati, khususnya: sub variabel komunikasi yang berkaitan dengan transmisi atau penyaluran komunikasi selama pelaksanaan Program Perbaikan Gizi Balita di Posyandu di Desa Banua Rantau, Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabalong, khususnya, ibu-ibu balita percaya bahwa kader masih melakukan pekerjaan yang buruk dalam memberikan layanan terkait gizi serta ditambah dengan minimnya sosialisasi. Sub-variabel sumber daya adalah: (a) Sumber daya manusia Di Kabupaten Tabalong, khususnya di Posyandu di Desa Banua Rantau, Kecamatan Banua Lawas, dan Program Perbaikan Gizi Balita, terdapat kurangnya pengetahuan di antara para petugas tentang gizi balita, dan tingkat pendidikan kader posyandu juga di bawah standar ideal. Mereka juga belum mendapatkan pelatihan yang dibutuhkan. (b) Fasilitas untuk Program Perbaikan Gizi Balita di Posyandu di Desa Banua Rantau, Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabalong masih kurang atau tidak memadai, misalnya, tidak ada tempat khusus untuk kegiatan posyandu dan harus meminjam di Taman Kanak-Kanak Al Qur'an karena alat penimbangan tidak selalu akurat. Tidak ada informasi yang cukup untuk dibagikan kepada para ibu yang memiliki anak kecil, kader tidak terlatih dengan baik, petugas posyandu memiliki tingkat pendidikan yang rendah, dan tidak ada sarana dan prasarana yang memadai, seperti alat penimbangan dan tempat khusus untuk mendukung kegiatan posyandu. Meskipun ada beberapa elemen yang berkontribusi terhadap keberhasilan program, seperti Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas untuk diikuti ketika menjalankan program, dana yang cukup ketika dibutuhkan, dan transparansi dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan posyandu.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Syahidin. (2023). *Implementasi Program Perbaikan Gizi Pada Balita Di Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Di Desa Murung Asam, Tambalang Kecil Dan Rantau Karau Hilir)* [Skripsi]. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.
- Anonim. (2014). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Upaya Perbaikan Gizi*.
- Anonim. 2023. *Pedoman Penyusunan Dan Penulisan Sripsi Sarjana Strata 1 (S1) Edisis Revisim* Amuntai : STIA
- Affrian, R. (2023) *Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*. Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media.
- Affrian, R. (2024) 'Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Studi Warung Remang-Remang Di Desa Sungai Buluh)', *Jurnal Niara*, 16(3), pp. 520–524.
- Affrian, R., Sukrisyanto, A. and Kusbandrijo, B. (2021) 'Evaluation of PT Adaro Indonesia's Corporate Social Responsibility (CSR) Program Policy, South Kalimantan, Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 90.
- Ainah, N. *et al.* (2022) 'ANALISIS PENGGUNAAN E-COMMERCE DI BIDANG FASHION TERHADAP LABA USAHA MIKRO DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.', *Journal of*

Syntax Literate, 7(9).

Amin, M.R., Munawarah, M. and Mahdalina, M. (2024) 'EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DI KELURAHAN PULAU KECAMATAN KELUA KABUPATEN TABALONG', *Jurnal Keuangan Daerah, Pusat dan Kearsipan*, 1(2), pp. 183–193.

Anjasmari, N.M.M. (2022) 'KINERJA PELAYANAN PENDIDIKAN BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS PADA SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI 1 AMUNTAI KECAMATAN AMUNTAI TENGAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *Administraus*, 6(2), pp. 152–159.

Anjasmari, N.M.M. (2023) 'KINERJA PEGAWAI PADA UNIT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH (UPPD) SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT) KECAMATAN DAHA SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), pp. 2163–2171.

Anjasmari, N.M.M. and Bakhtiar, M. (2024) 'IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG LARANGAN PENYELENGGARAAN REKLAME ROKOK DAN PRODUK TEMBAKAU PADA MEDIA LUAR RUANG DAN JALAN PROTOKOL DI KECAMATAN PARINGIN KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2469–2476.

Arlan, A.S. (2022) 'KINERJA PEGAWAI PADA UPT BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KECAMATAN LOKPAIKAT KABUPATEN TAPIN', *Al'iidara Balad*, 4(2), pp. 14–21.

Arlan, A.S. (2024) 'Implementasi Peraturan Bupati Tapin Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kabupaten Tapin: Studi Kasus di Kelurahan Bitahan', *Administraus*, 8(2), pp. 56–68.

Arlan, A.S. (2025) 'Peran Pemerintah Desa Sawang Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin', *Administraus*, 9(1), pp. 85–97.

Arlan, A.S. and Aida, N. (2023) 'Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Masyarakat di Puskesmas Pagat Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah', *Administraus*, 7(2), pp. 38–53.

Arpandi, A. (2024) 'EFEKTIVITAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PASAR DAN PERTOKOAN DI KAWASAN PASAR MODERN ADARO KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2594–2601.

Arpandi, A. and Aminah, S. (2023) 'Efektivitas Pengelolaan Sampah Pada Tempat Pembuangan Akhir (Tpa) Batu Merah Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(11), pp. 4750–4755.

Budiman, A., Husaini, M. and Norjannah, N. (2024) 'Efektivitas Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Simpang Empat Dan Desa Rukam Hilir)', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(3), pp. 1230–1236.

Budiman, A. and Souvia, B. (2023) 'IMPLEMENTASI EDUCATION MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM 4.0 PADA MADRASAH ALIYAH ASY SYAFI'YAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), pp. 2126–2133.

Emilyana, R. (2025) 'EFEKTIVITAS PROGRAM PENURUNAN STUNTING PADA UPT



- PUSKESMAS JUAI (STUDI KASUS DESA BUNTU KARAU DAN HUKAI KECAMATAN JUAI KABUPATEN BALANGAN)', *Al Iidara Balad*, 6(2), pp. 396–403.
- Fatimah, F. and Saladin, G. (2024) 'Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Di Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Subur Agro Makmur', *JURNAL BISNIS DAN PEMBANGUNAN*, 13(2), pp. 116–123.
- Halisah, H., Sugianor, S. and Arpandi, A. (2024) 'Efektivitas Program Bangga Kencana Melalui Pencatatan Laporan Aplikasi New Siga Pada Balai Penyuluhan Kb Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan', *Jurnal Pelayanan Publik*, 1(2), pp. 462–467.
- Handayani, R. and Rahmah, N.N. (2024) 'Pengaruh Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Efektivitas Program Penurunan Angka Stunting Di Desa Samhurang Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah', *Administraus*, 8(3), pp. 124–132.
- Hasbiyah, S. (2022) 'IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN SUNGAI PANDAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA: STUDI KASUS DESA RANTAU KARAU HULU', *Administraus*, 6(2), pp. 160–168.
- Hasbiyah, S. (2024) 'IMPLEMENTASI SISTEM E-FILLING DALAM PELAYANAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TAHUNAN (SPT) PADA KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN (KP2KP) PARINGIN KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2585–2593.
- Hasbiyah, S. and Fatmawati, A. (2023) 'Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Non Fisik Di Desa Paliat Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(11), pp. 4918–4922.
- Husaini, M. (2022) 'Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Miskin di Desa Kota Raja Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(9), pp. 15827–15834.
- Husaini, M., Raudah, S. and Amaliya, M. (2023) 'IMPLEMENTASI PRORGAM PERLUASAN JANGKAUAN UMKM DI KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), pp. 2134–2139.
- Hutabarat, Z.S. *et al.* (2023) 'Teaching practice program in college of education–creativity, emotional intelligence and locus of control', *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian dan Kajian Kepustakaan di Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Pembelajaran*, 9(1), pp. 244–257.
- Jumaidi, J. (2025) 'PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PASIEN DI PUSKESMAS RAWAT INAP KECAMATAN HARUYAN KABUPATEN HULUS SUNGAI TENGAH', *Al Iidara Balad*, 6(2), pp. 361–369.
- Junaidi, J. (2025) 'INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN DI UPT PUSKESMAS AMPAH KOTA KABUPATEN BARITO TIMUR', *Al Iidara Balad*, 6(2), pp. 370–377.
- Mardiah, M., Munawarah, M. and Setiawan, I. (2024) 'Efektivitas Program Posyandu Balita Dalam Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak di Desa Baruh Jaya Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan', *Jurnal Kebijakan Publik*, 1(2), pp. 343–350.
- Munawarah, M. (2022) 'PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *Al Iidara Balad*, 4(2), pp. 28–33.
- Mutmainah, F., Husaini, M. and Sugiannor, S. (2024) 'Efektivitas Program Percepatan Penurunan Stunting Di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan (Studi Kasus Desa Batu Merah dan Desa Lajar)', *Jurnal pelayanan publik*, 1(1), pp. 11–19.

- Oktavianty, P.A. *et al.* (2023) ‘Evaluasi Program Perbaikan Gizi Masyarakat Kategori Balita Berstatus Stunting Di Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Program Gerakan Atasi Stunting Dengan ASI “GUSI”)', *Jurnal Niara*, 15(3), pp. 388–399.
- Orbawati, O. (2025) ‘KUALITAS PELAYANAN PERPANJANGAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN (STNK) PADA KANTOR SAMSAT KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA’, *Al Iidara Balad*, 6(2), pp. 386–395.
- Raudah, S., Amalia, R. and Nida, K. (2022) ‘PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA BERBASIS MASYARAKAT DI KELURAHAN BATU PIRING KECAMATAN PARINGIN SELATAN KABUPATEN BALANGAN’, *Al’iidara Balad*, 4(1), pp. 49–58.
- Raudah, S. and Maulana, M.A. (2023) ‘Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara’, *Jurnal Niara*, 16(2), pp. 408–415.
- Raudah, S. and Radawiyah, R. (2023) ‘Pengaruh Pengelolaan Arsip Terhadap Kinerja Pegawai di Kantor Pertahanan Kabupaten Balangan’, *Jurnal Bisnis dan Pembangunan*, 12(1), pp. 64–72.
- Saputra, T. *et al.* (2023) ‘Bibliometric Studies and Public Administration Research Potential on Stunting Problems’, *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 6(2), pp. 197–211.
- Setiawan, I. (2023) ‘Partisipasi Masyarakat Dalam Program Keluarga Berencana Di Kecamatan Amuntai Utara’, *Jurnal Niara*, 16(1), pp. 14–19.
- Setiawan, I. (2024) ‘Relevansi Tenaga Honorer Terhadap Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara’, *Jurnal Niara*, 16(3), pp. 479–483.
- Setiawan, I., Sukristyanto, A. and Ibnu Rochim, A. (2021) ‘The Implementation of Law Number 16 of 2019 a Case Study of Early Marriage Prevention in Hulu Sungai Utara Regency Indonesia’, *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 117. Available at: <https://doi.org/10.11648/j.jpaa.20210503.16>.
- Sugianor, S. and Husaini, M. (2024) ‘PENGELOLAAN OBJEK WISATA TAMAN BUNGA POSKA DI DESA PEMATANG KECAMATAN BANUA LAWAS KABUPATEN TABALONG’, *Al Iidara Balad*, 6(1), pp. 189–193.
- Sugianor, S. and Mawarti, M. (2024) ‘IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT DALAM PENERTIBAN WARUNG REMANG-REMANG DI DESA TAPUS DALAM KECAMATAN SUNGAI PANDAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA’, *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(4), pp. 1883–1890.
- Trio, S. *et al.* (2023) ‘Civil Society Participation In Natural Resource Management In Conservation Areas: An Empirical Study Of Tesso Nilo National Park, Riau Province’, *Вопросы государственного и муниципального управления*, (5S1), pp. 48–68.
- Diana. (2020). *Implementasi Program Perbaikan Gizi Balita Di UPT Puskesmas Pasar Sabtu Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara* [Skripsi]. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2023. *Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)*.



Mardiah. (2023). *Efektivitas Program Posyandu Balita Dalam Meningkatkan Kesehatan Ibu Dan Anak Di desa Baruh Jaya Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2023*. [Skripsi]. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.

Nani Aprilia N.S. (2020). *Implementasi Program Perbaikan Gizi Masyarakat Oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru*. Fakultas Ilmu Sosial Dan ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Sinaga Marthin. (2023). *Implementasi Program Perbaikan Gizi Balita Di Posyandu Kelurahan Pandau Hilir Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan*. Fakultas Ilmu Sosial Dan ilmu Politik Universitas Medan Area.

Subarsono. (2015). *Analisis Kebijakan Publik ; Konsep, Teori, dan Aplikasi*. PUSTAKA BELAJAR.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan Penelitian Evaluasi*. Alfabeta.